

## **DAMPAK PAJAK DAERAH, DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP PENGELUARAN INVESTASI (BIAYA MODAL) DI KABUPATEN MALANG PADA RENTANG WAKTU 2007-2021**

**Alfauzia Noer Rochmatul Laily, Alphasyah Lazuardy Sidarta**

Universitas Brawijaya

Email: alfauzia9204@gmail.com

alphasyah@gmail.com

### **Abstrak:**

Pada penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi dan juga melakukan analisis dampak yang akan ditimbulkan dari Pajak Daerah, DAU dan DAK pada pengeluaran di sektor modal di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Malang pada tahun 2007 hingga 2021. Dua faktor utama yang terdapat dalam penelitian ini antara lain adalah faktor yang tidak terikat yaitu Pajak Daerah, DAU dan DAK, sedangkan faktor yang terikat dalam penelitian ini adalah Pengeluaran Sektor Modal. Penelitian ini menggunakan data yang diambil dari laporan keuangan, dan metode analisis yang diterapkan adalah Uji Regresi Berganda. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwasannya secara individual, antara Pajak Daerah dan DAK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengeluaran di sektor modal, sedangkan DAU tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengeluaran di sektor modal. Secara keseluruhan uji yang dilakukan menunjukkan bahwasannya Pajak Daerah, DAU dan DAK secara bersamaan memiliki pengaruh yang sama terhadap pengeluaran di sektor modal.

**Kata kunci:** *Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, Pajak Daerah*

### **Abstract:**

This study aims to identify and also analyze the impact that will be caused by Regional Taxes, DAU and DAK on expenditures in the capital sector within the Malang Regency Government from 2007 to 2021. The two main factors contained in this study include unbound factors, namely Regional Tax, DAU and DAK, while the factor bound in this study is Capital Sector Expenditure. This study uses data taken from financial statements, and the analysis method applied is the Multiple Regression Test. This study shows that individually, between Regional Tax and DAK has a significant influence on expenditure in the capital sector, while DAU does not have a significant effect on expenditure in the capital sector. Overall, the tests conducted show that Regional Tax, DAU and DAK simultaneously have the same influence on expenditure in the capital sector.

**Keywords:** *Capital Expenditure, Special Allocation Fund, General Allocation Fund, Local Tax*

## Pendahuluan

Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi, yang merupakan implementasi dari konsep otonomi daerah dalam tata kelola publik modern.<sup>1</sup> Dengan adanya desentralisasi, negara memberikan kekuasaan kepada daerahnya untuk mengelola segala yang terkait dengan daerah di daerah mereka sendiri, hal tersebut sejalan dengan UU Nomor 9 Tahun 2015 yang membahas tentang Pemerintah Daerah.<sup>2</sup> Dalam konteks daerah otonom, kolaborasi antara daerah pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat terjadi untuk menghasilkan kebijakan terkait dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebijakan ini berfungsi untuk panduan dalam menentukan alokasi sumber daya dalam APBD. Tujuan utamanya adalah memungkinkan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah, yang sesuai dengan peraturan daerah yang ada<sup>3</sup>. APBD berperan sebagai fondasi pertama dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. APBD memiliki tujuan untuk mengarahkan kegiatan pemerintah di daerah untuk memberikan pelayanan pada masyarakat selama periode satu tahun anggaran, terdapat berbagai elemen yang membentuk anggaran, termasuk pendapatan daerah, pengeluaran daerah, dan sumber pembiayaan daerah. Komponen pendapatan daerah mencakup sumber pendapatan yang diperoleh oleh daerah, sedangkan komponen pengeluaran daerah mencakup penggunaan dana untuk berbagai keperluan pemerintah daerah. Sementara itu, sumber pembiayaan daerah mengacu pada sumber-sumber pendanaan tambahan yang digunakan untuk menutupi kekurangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah. Dengan mengelola APBD secara efektif, pemerintah daerah dapat melaksanakan fungsi pelayanan publik serta memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pelaksanaan pengeluaran anggaran di tingkat daerah merupakan bagian yang diterapkan oleh pemerintah daerah. Salah satu fokus utama pengeluaran daerah adalah menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus memenuhi tanggung jawab yang dimiliki oleh daerah tersebut. Belanja modal juga merupakan bagian yang penting dari pengeluaran daerah, sebagaimana telah dikemukakan oleh Rahajeng dan rekan-rekannya (2021). Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengalokasikan pendapatannya secara produktif, terutama dalam bentuk belanja modal. Kontribusi belanja modal sangat signifikan dalam operasional pemerintah, hal tersebut dikarenakan akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat umum.<sup>3</sup> Sebagai komponen utama pengeluaran daerah, belanja modal memiliki dampak yang mendorong pertumbuhan ekonomi dalam struktur tersebut. Perekonomian yang sedang berlangsung membuat pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan di wilayah

---

<sup>1</sup> Ivana, D., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 4(2). <https://doi.org/10.24269/asset.v4i2.4356>

<sup>2</sup> Waskito, Zuhrotun, & Ruserliyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.

<sup>3</sup> Rahajeng, Kiki, & Hendrati. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*.

mereka secara independen dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pendanaan.<sup>4</sup>

Otonomi Daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kebahagiaan dan pelayanan kepada penduduk, memperkuat sistem demokrasi, mencapai kesetaraan dan keadilan, serta mempertahankan kolaborasi yang baik antara pusat dan juga daerah. Dalam mencapai pelayanan yang optimal dalam implementasi otonomi daerah, diperlukan pendanaan yang memadai. Pemerintahan daerah memiliki kemampuan guna mendapatkan pendanaan dari berbagai sumber, seperti pajak yang dikenakan di daerah tersebut, serta dana yang diberikan oleh pusat melalui adanya alokasi dana umum dan juga alokasi dana khusus.

Peneliti memiliki tujuan dalam penelitian untuk mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam dampak dari adanya Pajak Daerah, DAK dan DAU pada pengeluaran modal yang terjadi di Kabupaten Malang selama periode 2007 hingga 2021. Pendapatan daerah dimanfaatkan untuk mendanai pengeluaran daerah, baik untuk aktivitas rutin maupun investasi dalam infrastruktur. Pembayaran pajak daerah adalah tanggung jawab individu atau organisasi untuk membayar kepada pemerintah daerah tanpa mendapatkan imbalan yang setara secara langsung. Pembayaran ini disesuaikan dengan peraturan hukum dan bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan wilayah. Pemerintah memberikan dukungan finansial melalui mekanisme pendanaan yang dibagi antara pemerintahan di pusat dan juga daerah, salah satunya termasuk alokasi dana umum dan juga alokasi dana khusus. Dalam penelitian ini, kami akan menganalisis dampak dari pajak daerah, alokasi dana umum, serta alokasi dana khusus terhadap pengeluaran untuk investasi di Kabupaten Malang selama periode 2007-2021.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti pada Kabupaten Malang. Fokus peneliti ini mencakup Pajak Daerah, DAU, DAK, dan BM sebagai topik yang diteliti. Informasi yang digunakan pada studi ini terdiri dari APBD serta Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (LRAPBD) di Kabupaten Malang selama periode 2007-2021. Studi ini memanfaatkan data yang sudah ada yaitu LRAPBD yang bersifat sekunder di Kabupaten Malang selama periode tahun 2007 hingga 2021. Sumber data ini dapat diakses melalui situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di alamat <http://www.djpk.depkeu.go.id/>.

#### *Pengolahan Data*

Dalam studi ini, cara yang digunakan untuk menghimpun informasi tambahan yang diperlukan adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Pendekatan ini melibatkan proses pencarian dan pemeriksaan terkait dana yang relevan, kemudian dilakukan pencatatan dan juga pengolahan informasi yang memiliki hubungan dengan permasalahan pada variabel yang akan diteliti pada penelitian ini.

---

<sup>4</sup> Waskito, Zuhrotun, & Ruserliyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220-238.

### Teknik Analisis

Penelitian ini menggunakan teknik analisis dengan menggunakan perangkat lunak Stata. Pendekatan statistik digunakan adalah Regresi Linier Berganda. Sebelum melaksanakan Regresi tersebut, maka harus dilakukan beberapa uji antara lain adalah analisis deskriptif. Selain itu, juga dilakukan pengujian untuk memverifikasi asumsi klasik, dan akan dilanjutkan dengan melakukan uji terhadap hipotesis yang menggunakan uji-F dan juga uji-t, dan akan dilakukan pengujian untuk menentukan tingkat determinasi.

## Hasil dan Pembahasan

### Statistik Deskriptif

**Tabel 1. Statistik Deskriptif**

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
padx1	13	26.80846	1.214179	25.16	30.2
daux2	13	27.93385	.2516789	27.5	28.18
dakx3	13	25.99769	.8229437	24.95	27.11
biayamodaly	13	27.1	.5769891	26.37	28.63

Dengan merujuk pada hasil pengujian analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan oleh peneliti diatas, ditemukan bahwa  $X_1$  memiliki nilai minimum 25.16 dan nilai maksimum 30.2. Rata-rata dari  $X_1$  adalah 26.80846, dengan variasi sebesar 1.214179. Sedangkan  $X_2$  menunjukkan nilai minimum 27.5 dan nilai maksimum 28.18. Rata-rata  $X_2$  adalah 27.93385, dengan variasi sebesar 0.2516789. Sementara itu,  $X_3$  memiliki nilai minimum 24.95 dan nilai maksimum 27.11. Rata-rata  $X_3$  adalah 25.99769, dengan variasi sebesar 0.8229437. Terakhir, variabel Y menunjukkan nilai minimum 26.37 dan nilai maksimum 28.63. Rata-rata Y adalah 27.1, dengan variasi sebesar 0.5769891.

### Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Dengan memanfaatkan uji dari Shapiro-Wilk W test yakni *Normal Probability Plot*, hasil pengujian normalitas menunjukkan apakah distribusi variabel terikat dan variabel bebas dalam model regresi telah terdistribusi normal atau tidak.

**Tabel 2. Hasil Uji Shapiro-Wilk W Test**  
Shapiro-Wilk W test for normal data

Variable	Obs	W	V	z	Prob>z
biayamodaly	13	0.86928	2.302	1.634	0.05116

Setelah dilakukan Uji Shapiro-Wilk W Test, ditemukan Prob>Z sebesar 0,05116 untuk variabel  $X_1$ ,  $X_2$ ,  $X_3$  serta Y yang menjadi variabel dependen. Tingkat signifikansi  $\alpha = 0,05$  ( $0,05116 > 0,05$ ), sehingga nilai ini melebihi tingkat signifikansi yang ditentukan. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa data-data tersebut mengikuti distribusi normal. Sebagai akibatnya, asumsi normalitas dalam model regresi terpenuhi. Dengan demikian, model regresi tersebut dapat digunakan dengan validitas dalam konteks penelitian ini.

### b. Uji Multikolinieritas

Dalam rangka menguji apakah variabel yang digunakan peneliti memiliki hubungan antara variabel bebas dalam model regresi, maka peneliti melakukan pengujian multikolinieritas. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengidentifikasi multikolinieritas adalah dengan mengevaluasi nilai Toleransi dan *Variance Inflation Factor* (VIF).

**Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas**

Variable	VIF	1/VIF
dakx3	3.02	0.331372
daux2	2.93	0.341191
padx1	1.05	0.948077
Mean VIF	2.33	

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa variabel Pajak Daerah, DAU, dan DAK memiliki nilai VIF di bawah 10,00. Hal ini menunjukkan nilai Tolerance dan VIF pada variabel bebas dapat memenuhi kriteria yang ditetapkan. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak ada masalah terkait multikolinieritas pada regresi ini, serta pengujian multikolinieritas telah berhasil dilakukan.

### c. Uji Autokorelasi

Dalam uji ini peneliti memiliki tujuan untuk menginvestigasi apakah terdapat hubungan antara gangguan yang terjadi pada suatu periode dengan gangguan yang terjadi pada periode sebelumnya dalam model regresi linier.

**Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi**

	biayamody	padx1	daux2	dakx3
biayamody	1.0000			
padx1	0.9540	1.0000		
daux2	0.1789	0.1403	1.0000	
dakx3	0.2448	0.2189	0.8108	1.0000

Berdasarkan Tabel 4, seluruh variable pada uji autokorelasi menghasilkan nilai Pearson-Correlation diatas 0.05. Dari pernyataan tersebut, dapat diberi kesimpulan bahwa dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini tidak memiliki autokorelasi karena nilai koefisien korelasi Pearson melebihi 0.05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak ada korelasi yang berarti antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

### d. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini bertujuan untuk memastikan tentang perbedaan yang signifikan dalam varians residu antara banyak pengamatan di dalam model regresi.

**Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas**  
 Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity  
 Ho: Constant variance  
 Variables: biyamodaly

chi2(1) = 2.81  
 Prob > chi2 = 0.0938

Berdasarkan hasil Uji Heteroskedastisitas, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai Prob>Chi2 sebesar 0.0938, melebihi nilai signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05. Kesimpulannya adalah tidak terdapat indikasi adanya heteroskedastisitas dalam data tersebut, dan hipotesis nol dalam Uji Heteroskedastisitas dapat diterima.

*Analisis Regresi Linier Berganda*

Belanja Modal dapat dianalisis menggunakan Regresi Linier Berganda untuk mengevaluasi pengaruh Pajak Daerah, DAK, serta DAU. di Kabupaten Malang selama periode 2007-2021. Hasil perhitungan regresi yang dilakukan menggunakan perangkat lunak Stata dapat ditemukan dalam Tabel 5 berikut ini:

**Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	13
				F(3, 9)	=	31.18
Model	3.64436812	3	1.21478937	Prob > F	=	0.0000
Residual	.350629054	9	.038958784	R-squared	=	0.9122
				Adj R-squared	=	0.8830
Total	3.99499718	12	.332916431	Root MSE	=	.19738

  

biyamodaly	Coef.	Std. Err.	t	P> t	Beta
padx1	.4502672	.0481956	9.34	0.000	.9475136
daux2	.1044441	.3875846	0.27	0.794	.0455578
dakx3	.0003768	.1202775	0.00	0.998	.0005375
_cons	12.10171	8.62272	1.40	0.194	.

Persamaan yang didapat dari tabel diatas adalah :

$$BM = 12.10171 + 0.4502672PD - 0.1044441DAU + 0.0003768DAK + e$$

*Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)*

**Tabel 7. Hasil Uji R<sup>2</sup>**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	13
Model	3.64436812	3	1.21478937	F(3, 9)	=	31.18
Residual	.350629054	9	.038958784	Prob > F	=	0.0000
				<b>R-squared</b>	=	<b>0.9122</b>
				Adj R-squared	=	0.8830
Total	3.99499718	12	.332916431	Root MSE	=	.19738

  

biayamodaly	Coef.	Std. Err.	t	P> t	Beta
padx1	.4502672	.0481956	9.34	0.000	.9475136
daux2	.1044441	.3875846	0.27	0.794	.0455578
dakx3	.0003768	.1202775	0.00	0.998	.0005375
_cons	12.10171	8.62272	1.40	0.194	.

*R-squared* (R<sup>2</sup>) berguna untuk mengevaluasi sejauh mana model mampu mendeskripsikan variasi dari variabel dependen. Dalam konteks ini, R-Square memiliki nilai 0,9122 atau setara dengan 91,22%. Hasil ini mengindikasikan bahwa sekitar 91,22% variasi dalam BM dapat dijelaskan oleh Pajak Daerah, DAU, dan DAK. Sementara itu, sekitar 8,78% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.

*Uji Hipotesis*

a. *Uji Signifikansi Simultan (Uji F)*

**Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Simultan**

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	13
Model	3.64436812	3	1.21478937	F(3, 9)	=	31.18
Residual	.350629054	9	.038958784	<b>Prob &gt; F</b>	=	<b>0.0000</b>
				R-squared	=	0.9122
				Adj R-squared	=	0.8830
Total	3.99499718	12	.332916431	Root MSE	=	.19738

  

biayamodaly	Coef.	Std. Err.	t	P> t	Beta
padx1	.4502672	.0481956	9.34	0.000	.9475136
daux2	.1044441	.3875846	0.27	0.794	.0455578
dakx3	.0003768	.1202775	0.00	0.998	.0005375
_cons	12.10171	8.62272	1.40	0.194	.

Berdasarkan uji regresi, terdapat temuan bahwa nilai signifikansi adalah 0,000. Hasil uji ini dapat dikatakan X<sub>1</sub>, X<sub>2</sub>, dan X<sub>3</sub> secara bersamaan memiliki pengaruh terhadap variabel Y. Sehingga, disimpulkan bahwa ketiga faktor tersebut memainkan peran penting dalam mempengaruhi Belanja Modal.

## b. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Tabel 7. Hasil Uji Signifikansi Parsial

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	13
Model	3.64436812	3	1.21478937	F(3, 9)	=	31.18
Residual	.350629054	9	.038958784	Prob > F	=	0.0000
				R-squared	=	0.9122
				Adj R-squared	=	0.8830
Total	3.99499718	12	.332916431	Root MSE	=	.19738

  

biayamodaly	Coef.	Std. Err.	t	P> t	Beta
padx1	.4502672	.0481956	9.34	0.000	.9475136
daux2	.1044441	.3875846	0.27	0.794	.0455578
dakx3	.0003768	.1202775	0.00	0.998	.0005375
_cons	12.10171	8.62272	1.40	0.194	.

Pada analisis signifikansi parsial (uji-t), telah ditemukan Pajak Daerah berpengaruh yang positif serta signifikan terhadap pengeluaran untuk BM dengan tingkat signifikansi 0,000, yang <0,05. Telah ditemukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran untuk BM dan memberikan kontribusi penting dan signifikan terhadap BM. Namun, Hasil uji signifikansi parsial menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara DAU dan BM, dengan tingkat signifikansi sebesar 0,794 yang >0,05. Demikian pula, DAK juga tidak berpengaruh pada BM, dengan signifikansi 0.998 yang >0.05. Sehingga disimpulkan bahwa hanya pajak daerah yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap BM, sedangkan variabel lainnya tidak.

## Pembahasan

### *Pengaruh Pajak Daerah terhadap Belanja Modal*

Melalui analisis parsial (uji t), ditemukan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara Pajak Daerah dan BM. Fakta ini dapat diidentifikasi melalui tingkat signifikansi Pajak Daerah yang mencapai  $0,000 > 0,05$ . Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin banyak tingkat penerimaan pajak daerah, maka belanja modal juga akan meningkat. Selama lima tahun terakhir, terjadi tren pertumbuhan yang positif dalam pendapatan daerah di Kabupaten Malang. Peningkatan pendapatan pajak daerah berkontribusi terhadap pertumbuhan ini. Pada tahun 2019, pajak daerah menyumbang sekitar 75,90% dari total pendapatan Kabupaten Malang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berhasil mencapai kemandiriannya dalam mengembangkan Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberhasilan ini menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan belanja daerah, terutama dalam hal belanja modal.

### *Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal*

Sesuai dengan hasil uji signifikansi parsial (uji-t), ditemukan bahwa signifikansi untuk DAU adalah 0,794, melebihi nilai ambang batas yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 0,05. Sehingga dapat diberi sebuah kesimpulan bahwasannya tidak memiliki hubungan yang signifikan antara DAU dan BM. Atau dapat dinyatakan bahwa fluktuasi DAU tidak memiliki dampak terhadap belanja modal. Penelitian ini disimpulkan bahwa selama periode 2007-2021 Kabupaten Malang lebih condong menggunakan DAU untuk

pengeluaran yang cenderung konsumtif daripada pengeluaran modal yang berorientasi pada produktivitas.

#### *Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal*

Berdasarkan temuan dari pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini menggunakan uji t (parsial), didapati bahwa pentingnya DAK adalah 0,998, yang mengindikasikan bahwa nilai tersebut melebihi tingkat nilai ambang batas yang telah ditetapkan, yaitu  $<0,05$ . Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh DAK terhadap BM tidak memiliki signifikansi yang berarti. Hal ini menyiratkan bahwa jika terjadi peningkatan DAK, hal tersebut tidak akan berdampak signifikan pada alokasi dana untuk BM.

Perlu diperhatikan bahwa DAK terbagi menjadi DAK Non Fisik dan DAK Fisik. Tujuan dari DAK adalah memberikan dukungan keuangan dalam mendukung suatu kekhususan kegiatan di wilayah tertentu yang memilikis tanggung jawab pemerintah daerah. Dana ini dibagikan sesuai dengan skala prioritas nasional, terutama untuk menunjang fasilitas dan infrastruktur dasar masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan publik. Dengan kata lain, DAK didesain untuk memberikan bantuan keuangan kepada daerah-daerah tertentu guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur dan fasilitas dasar, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

### **Kesimpulan**

Setelah melakukan pengujian data, dapat disimpulkan bahwa BM dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan DAK, sedangkan DAU tidak berdampak pada BM. Namun, secara keseluruhan, jika semua faktor tersebut digabungkan, yaitu Pajak Daerah, DAU, dan DAK, terdapat pengaruh terhadap BM.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan yang telah diungkapkan sebelumnya, terdapat beberapa saran terhadap penelitian yang akan datang yakni, dapat diberikan dalam rangka penelitian ini, Diharapkan bahwa Pemerintah Daerah terus berupaya mengeksplorasi sumber-sumber pendapatan daerah guna mendapatkan dana yang dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas layanan publik di wilayah tersebut. Penting untuk melakukan langkah-langkah yang terus meningkatkan pendapatan dari Pajak Daerah setiap tahunnya, agar dapat dimanfaatkan dengan maksimal dalam alokasi Belanja Modal yang berpotensi memberikan dampak positif pada pembangunan. Selain itu, penting juga untuk mengoptimalkan dan memanfaatkan secara produktif Dalam penelitian lanjutan yang akan mengeksplorasi fokus penelitian yang sama, disarankan untuk mempertimbangkan penambahan variabel independen tambahan. Beberapa contoh variabel independen yang dapat dipertimbangkan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), serta faktor-faktor relevan lainnya. Selain itu, disarankan pula untuk memperpanjang periode waktu penelitian guna penelitian dapat menghasilkan pemahaman yang lebih lengkap mengenai keterkaitan antara variabel-variabel tersebut, sehingga menghasilkan hasil yang lebih akurat dan mewakili.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Dirvi Surya et al. 2020. Belanja Modal di Provinsi Banten Beserta Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Akuntansi Program Studi Akuntansi STIE Sultan Agung*. ISSN-P: 2502-4574, ISSN-E: 2686-2581, Volume 6 Nomor 2, Desember 2020.
- Abdul Halim & Syukry Abdullah, 2008, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan Vol.2, No.2, November 2006*.
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, *Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November*.
- Azhari Aziz Samudra, 2015. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers). Baru Press.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. *E-Journal Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1. Vol 2 No 1*.
- Gede, Putu Mahendra Putra dan I Gusti Ketut Agung Ulupui. 2015. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Untuk Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol. 11, No. 3 (2015) : 863-877*. ISSN: 2302 -8556.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ivana, D., Hardiwinoto, H., & Nurcahyono, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal. *ASSET: Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 4(2)*. <https://doi.org/10.24269/asset.v4i2.4356>
- Mardiasmo. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Putra, P. G., & Ulupui, I. G. (2015). PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, UNTUK MENINGKATKAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*.
- Rahajeng, Kiki, & Hendrati. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, DAU, DAK Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur (Periode 2008-2019). *Inovasi Manajemen Dan Kebijakan Publik*.
- Retno, N. D., & Widiatmoko, J. (2019). PAD, DAU, DAK, DBH, LUAS WILAYAH TERHADAP BELANJA MODAL DAN DAMPAKNYA PADA PERTUMBUHAN EKONOMI (Studi pada Provinsi/Wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali Tahun 2012-2017). *23Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan, 8(1), 23-35*.
- Samudera, A. A. (2015). *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Waskito, Zuhrotun, & Ruserliyani. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh). *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(2), 220–238.